

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Riau periode 2015–2024 menggunakan pendekatan statistik deskriptif, *Location Quotient* (LQ), *Export Base Model*, serta *Trendd Analysis*, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan PDRB Riau menunjukkan trend meningkat dengan rata-rata sebesar Rp 206.221.200 juta per triwulan (harga berlaku). Meskipun sempat mengalami kontraksi pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, perekonomian Riau secara umum kembali pulih dan tumbuh positif hingga 2024.
2. Struktur ekonomi Riau masih didominasi oleh sektor basis berbasis sumber daya alam. Hasil perhitungan LQ menunjukkan tiga sektor unggulan, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (LQ 1,908), pertambangan dan penggalian (LQ 2,898), serta industri pengolahan (LQ 1,347). Sektor-sektor ini memiliki keunggulan komparatif yang kuat dan menjadi motor penggerak utama perekonomian daerah.
3. Kontribusi sektor basis terhadap PDRB sangat signifikan, dibuktikan dengan hasil regresi *export base model* yang menunjukkan koefisien 1,372 dengan R^2 0,992. Artinya, hampir seluruh variasi PDRB dapat dijelaskan oleh perkembangan sektor basis. Hal ini menegaskan peran sentral sektor basis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Riau melalui *trendd analysis* menunjukkan prospek yang positif. PDRB diperkirakan terus meningkat hingga Rp289.256.900 juta pada triwulan IV tahun 2026. Demikian pula, sektor basis utama seperti industri.

5. Kebijaksanaan pembangunan regional Provinsi Riau secara umum telah sejalan dengan potensi sektor basis utama yang meliputi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan penggalian; serta industri pengolahan. Nilai *Location Quotient* (LQ) dan hasil model *Export Base* membuktikan bahwa ketiga sektor tersebut memiliki keunggulan komparatif dan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan dalam RPJMD Provinsi Riau 2019–2024, seperti penguatan industri pengolahan berbasis kelapa sawit dan migas, pengembangan pertanian berkelanjutan, serta optimalisasi sektor kehutanan dan perikanan, mendukung hasil penelitian ini. Namun, efektivitas implementasinya masih perlu diperkuat karena aktivitas ekonomi masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan belum merata ke seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau.
6. Arah kebijakan pembangunan regional yang seharusnya dilakukan untuk memperkuat daya saing, pemerataan, dan keberlanjutan di Provinsi Riau perlu difokuskan pada transformasi ekonomi yang berorientasi pada hilirisasi, diversifikasi, dan keberlanjutan lingkungan. Berdasarkan hasil analisis trend, sektor industri pengolahan memiliki potensi terbesar untuk menjadi motor pertumbuhan, sementara sektor pertanian dan kehutanan berperan dalam pemerataan ekonomi antar wilayah. Oleh karena itu, kebijakan ke depan harus diarahkan pada penguatan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, pemerataan infrastruktur dan investasi di wilayah hinterland, serta penerapan prinsip ekonomi hijau guna menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Pendekatan tersebut akan menciptakan struktur ekonomi daerah yang lebih tangguh, berdaya saing, dan inklusif sesuai dengan visi pembangunan berkelanjutan dalam RPJMD Provinsi Riau 2019–2024.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang dihadapi, beberapa saran berikut dapat dipertimbangkan untuk pengembangan penelitian selanjutnya maupun perumusan kebijakan yang lebih efektif:

1. Pemerintah Provinsi Riau perlu memperkuat implementasi kebijakan sektor basis melalui penguatan hilirisasi industri pengolahan berbasis sumber daya alam seperti kelapa sawit, hasil hutan, dan perikanan. Hilirisasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas ekspor, tetapi juga memperluas kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor non basis yang mendukung aktivitas industri.
2. Pemerataan pembangunan antar wilayah harus menjadi prioritas utama, khususnya dengan memperluas investasi infrastruktur ekonomi di wilayah hinterland seperti Indragiri Hulu, Rokan Hulu, dan Kuantan Singingi. Pengembangan jaringan jalan produksi, akses transportasi logistik, serta pusat distribusi hasil pertanian dan kehutanan perlu dipercepat agar manfaat pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di Pekanbaru dan Dumai, tetapi juga dirasakan merata di kabupaten/kota lainnya.
3. Pembangunan ekonomi daerah harus berorientasi pada prinsip keberlanjutan lingkungan (*green economy*) dengan memperkuat pengawasan terhadap kegiatan eksploitasi sumber daya alam dan memperluas program rehabilitasi hutan dan lahan kritis. Penerapan standar lingkungan dan efisiensi energi dalam kegiatan industri dan pertambangan menjadi langkah penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam di Riau.
4. Pemerintah daerah bersama perguruan tinggi dan sektor swasta perlu membangun sinergi riset dan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor basis. Dukungan riset terapan, pelatihan tenaga kerja, serta penyediaan akses pembiayaan bagi UMKM di sektor pertanian, kehutanan, dan industri pengolahan akan memperkuat fondasi ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar pengembangan studi serupa dilakukan dengan menambahkan variabel lain seperti investasi, tenaga kerja, dan indeks pembangunan manusia (IPM) agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara sektor basis, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat

